

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

Adi Purwanto

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta-Indonesia

adi_hadinagoro@yahoo.com

ABSTRACT

Poverty is a social problem that is multidimensional, and therefore requires a comprehensive treatment. Central Java Governor gives a high priority to the problem of handling poverty reduction, according to RPJMD Central Java in 2013-2018. In March 2014 the number of poor people reached 4.836 million (14.46%) with distribution in rural areas as much as 2,891 million (59.78%) and in urban areas as many as 1.945 million people (40.22%). Given the number of poor people in rural areas more than urban areas, and therefore poverty reduction in rural areas needs to be addressed and handled more conceptual, systematic and sustainable. In accordance with the Regulation of the Central Java Governor Number 11 in 2015 on the Financial Aid To the Village Administration To Pioneer Village Model Berdikari In Central Java province Year 2015, then to tackle poverty in Rural Blora been appointed village: Temulus, Sumberejo and Pilang subdistrict of Randublatung as Pilot Model Village Berdikari. Types of Activities chosen to reducing poverty is a goat farm, paving and batik printing. The purpose of this study to determine the extent of the implementation of poverty reduction policies through Pioneer Village Model Berdikari. The method used in this research is qualitative descriptive model. In analyzing the data obtained in the field by using the theory of Van Meter and Van Horn. Results of this study, that the implementation of the policy of program Pioneer Village Model of Self-reliance can run well, while necessary improvements in terms of regulation, implementation, coordination, communication, synchronization and synergy program between Central Java Provincial Government and District Blora.

Keyword: *Poverty, Berdikari Village, synergy, descriptive-qualitative*

PENDAHULUAN

Berangkat dari permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah, dan sejalan dengan strategi serta kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan program Desa Berdikari dengan harapan dapat diwujudkan secara bertahap pada rentang waktu 2015-2018. Program ini tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Program/kegiatan difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif didukung program/kegiatan dalam lingkup sosial budaya dan lingkungan. Penjaringan usulan kegiatan prioritas dilakukan secara *bottom up*, dengan melibatkan masyarakat untuk menemukannya potensi dan kebutuhan desa melalui rembug warga dengan pendampingan oleh fasilitator dan Kader Desa Berdikari (KDB).

Sejalan dengan isu strategis RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu pengurangan kemiskinan serta arah kebijakan pengurangan kemiskinan diprioritaskan pada wilayah dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi, maka pemilihan lokasi diprioritaskan pada 15 kabupaten dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Perwujudan Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pemilihan 45 desa pada 15 Kecamatan di 15 Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut: Kriteria Kabupaten, lokasi desa

model dipilih dari kabupaten yang mewakili, a) Letak geografis wilayah utara (pantai utara/pantura), wilayah tengah (pegunungan dan dataran) dan wilayah selatan (pantai selatan/pansela dan pegunungan), b) Kabupaten dengan tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode September 2012 (Data Makro, BPS). Kriteria Kecamatan, lokasi desa model dipilih dari kecamatan yang mewakili, a) Kecamatan pada Kabupaten hasil kriteria penilaian Kabupaten sasaran, b) Kecamatan yang memiliki unggulan tertentu tetapi merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi (berdasarkan data PPLS 2011, BPS). Kriteria Desa, lokasi desa model dipilih dari 3 desa yang mewakili, a) Desa pada kecamatan hasil penilaian kecamatan sasaran, b) Desa yang memiliki letak geografis berdekatan dengan desa dengan mempertimbangkan potensi dan interrelasi antar desa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi kebijakan rintisan model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 di kabupaten Blora?

METODE

Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Guna mendalami fokus tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi, yang didalam penelitian sosial dikenal dengan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada. Dalam menganalisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Teori yang dipakai sebagai acuan melakukan penelitian ini adalah teori kebijakan publik, implementasi kebijakan dan teori kemiskinan. Subyek dalam penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Provinsi Jawa Tengah, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana), Kecamatan, Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Kader Desa Berdikari dan masyarakat penerima bantuan. Adapun lokasi penelitian di Kantor adalah BPMPKB Blora, Kecamatan Randublatung, Desa Temulus, Pilang dan Sumberejo. Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, focus group discussion, teknik dokumentasi dan observasi.

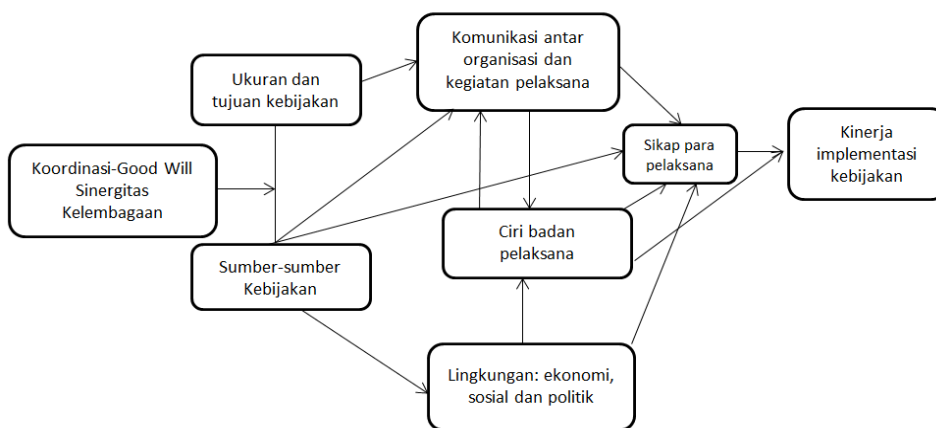
TEORI

Model Implementasi Kebijakan Rintisan Desa Berdikari

Sebagaimana dikatakan Korten (1983), faktor kepemimpinan ikut mempengaruhi dan salah satu kunci kesuksesan keberhasilan program masyarakat, dapat dilihat adanya kepemimpinan yang baik dari tokoh kunci masyarakat, pihak pemerintah lokal, dan pemimpin masyarakat lainnya, sehingga dapat dijadikan panutan oleh masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam pelaksanaan program. Begitu pun dengan sumber daya, tanpa kemampuan sumber daya maka mustahil pula keberhasilan program itu akan tumbuh, karena umumnya orang yang memiliki sumber daya memadai saja yang banyak aktif dalam pelaksanaan kegiatan, yang memiliki sumber daya yang terbatas (ekonomi lemah) sibuk dengan urusannya mencari nafkah dan tidak mampu memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan pelaksanaan program (pendidikan rendah).

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari ini adalah, program tersebut banyak melibatkan aktor pelaksana. Solusi yang diberikan oleh Van Matter Van Horn adalah penguatan dan komunikasi inter organisasi. Penelitian menemukan bahwa komunikasi inter organisasi program Rintisan Model Desa Berdikari sudah dapat dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah masih rendahnya koordinasi, komitmen dan *good will* pelaksana baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas kelembagaan, yang diikuti dengan kejelasan kewenangan dan tanggungjawab antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Gambar Model Implementasi Kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari



Sumber: Adaptasi dari Model van Matter van Horn

PEMBAHASAN

Model Komunikasi Kelembagaan dan Penyusunan Program Kegiatan

Peran Pemerintah Kabupaten dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari adalah membantu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan program sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Peran Pemerintah Provinsi dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari di tingkat kecamatan, kabupaten lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing saja. Masyarakat merupakan pelaku utama Program Rintisan Model Desa Berdikari. Program ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti menghasilkan temuan sebagai berikut:

Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah desa merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi Program Rintisan Model Desa Berdikari di desa. Dalam musyawarah desa dilakukan pemilihan Kader Desa Berdikari (KDB) yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, pemilihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. KDB merupakan warga desa terpilih yang bertugas memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan partisipatif dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan serta pelaporan. Sedangkan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan Program Rintisan Model Desa Berdikari.

Penggalian Gagasan

Metode yang digunakan dalam pembuatan peta sosial pada pertemuan desa adalah 1) penentuan klasifikasi kesejahteraan dan pemetaan sosial. Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah, dan kurang mampu. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga yang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses ini, fasilitator mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin. 2) Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan kelompok untuk menemukan gagasan sesuai kebutuhan masyarakat, gagasan yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di perdesaan. 3) Musdes merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok. Peserta musdes meliputi: kades, perangkat desa, BPD, LKMD, wakil RTM desa, wakil perempuan RT, RW, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Pada dasarnya proses komunikasi yang digunakan pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikaridalam mensosialisasikan adalah dengan cara musyawarah. Dengan begitu proses sosialisasi selanjutnya akan lebih mudah karena ada banyak pihak yang ikut berperan serta dalam proses komunikasi

Sinergitas Kelembagaan Pelaksanaan Program.

Program Rintisan Model Desa Berdikari kurang berjalan optimal karena lemahnya koordinasi pelaksanaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Blora. Kurang intensnya komunikasi terlihat Pemerintah Kabupaten tidak optimal berperan dalam melaksanakan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Pemerintah Kabupaten Blora tidak menganggarkan secara khusus untuk mendukung pelaksanaannya. SKPD tidak memiliki respons positif dalam pelaksanaannya, hanya BPMPKB kabupaten Blora yang aktif, meskipun SDM tidak mencukupi dan anggaran yang diambilkan dari dana rutin BPMPKB.

Rendahnya Good Will pemimpin

Lemahnya *good will* Pemerintah Kabupaten dan kurangnya kepedulian dalam sinergitas pelaksanaan kebijakan program terlihat pada tidak ada alokasi anggaran di APBD Blora untuk Program Rintisan Model Desa Berdikari. Padahal penanggulangan kemiskinan di Blora perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian. Program Rintisan Model Desa Berdikari sebenarnya sudah mengatur tentang pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan, diupayakan sampai ke tingkat yang paling bawah. Pendelegasian kewenangan itu hanya ditangani satu SKPD, yaitu BPMPKB.

Implikasi terhadap Model Partisipasi.

Pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program-program tersebut. Penyimpangan dari ketentuan dan prosedur dan ketentuan dapat mengganggu pelaksanaan program. Prosedur dan panduan proses pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari ditentukan oleh Pemerintah Provinsi. Ini lebih didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai dari penyusunan rencana sampai dengan pelestarian hasil-hasil kegiatan. Program Rintisan Model Desa Berdikari melibatkan masyarakat secara aktif dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama program.

Implikasi Terhadap Model Komunikasi Pelaksanaan Program

Dalam konteks komunikasi teori yang relevan dengan temuan penelitian adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi mengasumsikan bahwa peran komunikasi secara luas dalam merubah masyarakat melalui penyebaran ide-ide dan hal baru. Dalam proses penyebaran inovasi terdapat unsur-unsur utama antara lain: adanya suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran, terjadi dalam suatu jangka waktu tertentu dan ada sasaran atau para anggota suatu sistem sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian, dimana langkah pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari dalam menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa maupun kecamatan, telah memunculkan adanya proses difusi inovasi yang berkenaan dengan komunikasi pembangunan. Inovasi disini berupa suatu program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, disampaikan melalui forum musyawarah tingkat desa dan kecamatan, dan terjadi pada jangka waktu tertentu. Inovasi tersebut secara perlahan telah menjadi suatu adopsi yang dalam hal ini bisa terjadi penolakan ataupun penerimaan oleh masyarakat. Masyarakat yang menerima program tersebut akan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Sedangkan masyarakat bukan penerima program tersebut akan kurang peduli dengan keberadaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Program pembangunan tersebut bisa saja menjadi sesuatu yang inovatif bagi masyarakat namun belum tentu juga oleh masyarakat lain. Model komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari adalah model komunikasi sirkuler Osgood-Schramm. Model ini menggambarkan suatu proses yang dinamis, yakni sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Berbeda dengan model linear, dalam model ini semua pihak yang berkomunikasi saling memiliki peran sebagai pengirim. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, bahwa dalam forum musyawarah baik di tingkat dusun, desa maupun tingkat kecamatan, antara pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari dengan perangkat desa maupun masyarakat saling bertukar pikiran untuk memberikan argumennya dalam menyusun program perencanaan pembangunan. Dan merekapun memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai subyek pembangunan.

Dari keseluruhan model di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa model-model tersebut mengarah pada model komunikasi banyak tahap, yakni pemerintah sebagai penggagas inovasi pembangunan menyampaikan kepada pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari, kemudian pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari menyosialisasikan kepada kepala desa beserta utusan desa yang berjumlah enam orang melalui forum Musyawarah Desa Sosialisasi. Setelah itu, kepala desa kembali ke desanya menyampaikan kepada tokoh masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program melalui forum Musyawarah Dusun (penggalan gagasan).

Model banyak tahap ini lebih akurat dalam menjelaskan pembentukan opini dan sikap. Masyarakat (khalayak) dari sumber utama yakni pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari, bisa secara langsung atau tidak terlihat dengan jelas individu bisa mendapatkan informasi dari individu yang lain, atau dari kelompok lain. Intinya model komunikasi multi tahap ini menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bisa mempunyai pengaruh dan dipengaruhi baik individu, maupun kelompok dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara.

Implikasi Terhadap Model Pemberdayaan Masyarakat

Program Rintisan Model Desa Berdikari merupakan program pemberdayaan masyarakat. Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai

dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga Negara.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Karena dasarnya adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Cara demikian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merancang, malaks anakan, mengeloladan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kelompok karena bila warga masyarakat secara sendiri-sendirikurang berdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari meliputi aspek pengutamaan kepentingan umum, kesamaan nilai dalam masyarakat, komunikasi antar warga, peningkatan kepercayaan diri masyarakat, pengembangan manajemen keorganisasian, majanemen kewirauhaan, jaringan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian, dan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat. Pendekatan yang selama ini dijalankan dalam program Program Rintisan Model Desa Berdikari sesuai untuk semua lapisan masyarakat baik tua atau muda, baik berpendidikan rendah atau tinggi, namun masih perlu peningkatan pada program-program yang mendukung kesetaraan gender. Pengembangan kapasitas masyarakat sebagai salah satu prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari menyesuaikan dengan elemen-elemen pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat daritahap persiapan berupa persiapan penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Terdapat faktor pendukung yang memperlancar pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dalam faktor komunikasi yaitu: sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar dan konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Faktor pendukung sumber daya yaitu, kemampuan pelaksana memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan Program Rintisan Model Desa Berdikari, kemampuan pelaksana kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Faktor pendukung sikap pelaksana yaitu: adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dan adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari, dan pelaksanaan kegiatan operasionalnya Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Faktor struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari. Untuk faktor Lingkungan yaitu; adanya kapasitas BPD dan Lembaga

kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan Program Rintisan Model Desa oleh BPD serta peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari, sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari, adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan faktor pendukung ukuran dan tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah mengenai Program Rintisan Model Desa Berdikari meskipun tidak semua kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dilaksanakan sesuai program oleh Desa penerima bantuan dana di wilayah Kecamatan Randublatung, karena disesuaikan dengan potensi alam dan kemampuan SDM masing-masing desa. Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Program Rintisan Model Desa Berdikari kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari maupun dalam pengawasan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat sumber daya ini adalah terbatasnya pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari, sehingga pelaksanaan mengenai Program Rintisan Model Desa Berdikari kurang optimal, tidak adanya dukungan pendanaan dari kabupaten Blora. Faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari yang menganggap kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari adalah sebuah kebijakan Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak memiliki good will, tanggungjawab dan kewenangan untuk mengoptimalkan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora sehingga kurangnya koordinasi Tim pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari. Dan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya SKPD di pemerintahan kabupaten Blora tidak berpartisipasi dalam perencanaan program dan alokasi anggaran yang bersinergi dengan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana Program Rintisan Model Desa Berdikari, bahkan ada yang belum dapat menyelesaikan laporan kegiatannya. direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

Saran

Ada beberapa saran agar pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat miskin agar lepas dari lingkaran setan kemiskinannya. Saran dimaksud adalah sosialisasi terhadap kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan usaha. Dan perlu dibangun sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data. Perlu pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari LKMD, khususnya dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Optimalisasi pendampingan di tingkat Pemerintah Kabupaten oleh BPMPKB Blora, agar mampu mendorong kepedulian dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Desentralisasi yang lebih besar kepada para

pelaksana di tingkat bawah yang langsung bersentuhan dengan *target group* (masyarakat miskin) sehingga mampu mengakomodir budaya dan kearifan lokal dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Blora) untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan program. Meningkatkan koordinasi diantara pelaku-pelaku program-program pengentasan kemiskinan melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora. Komite ini belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Dan Bappeda Blora. (2003). *Blora Dalam Angka*.
- Bupati Blora. (2015). *Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora*. Blora: Arsip Bagian Hukum .
- Burhan Bungin, Agus Sukristyanto, V Rudy Handoko. (2016). *Buku Pedoman Penulisan MKPD, PROPOSAL, DAN DISERTASI Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, . Prenadamedia Group.
- Djam'an Satiri Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet .
- Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2013). *Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013*.
- Van Meter, D.S, and Van Horn, C.E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration Society